



APBD Tahun Anggaran 2024 Kota Jogja Disahkan, Belanja Capai Rp 2,03 Triliun

Tingkatkan PAD, Banggar Rekomendasikan Optimalkan Aset, hingga Awasi Perizinan Hotel

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 Kota Jogja disepakati bersama antara pimpinan DPRD Kota Jogja dan Penjabat Wali Kota Jogja Singgih Raharjo untuk ditetapkan menjadi APBD TA 2024.



SUSANTO DWI ANTORO

ADA beberapa poin penting yang menjadi catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jogja. Di antaranya, banggar menemukan masih adanya inkonsistensi dan ketidaksinkronan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. "Itu dibuktikan dengan munculnya anggaran atas *output* (keluaran, Red) yang tidak tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) RAPBD TA 2024," ujar Juru Bicara Banggar DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro kemarin (28/11).

Di samping itu, Toro, sapaan akrabnya, mengapresiasi kinerja pemkot dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini sebagai ilustrasi pada TA 2023 PAD Kota Jogja sebesar 658 miliar.

Baca *Tingkatkan...* Hal 7



KESEPAKATAN BERSAMA: Dari kiri ke kanan PJ Wali Kota Singgih Raharjo, Ketua Dewan Danang Rudyatmoko dan dua wakil ketua dewan M. Furzan serta Dhan Novitasari menghadiri paripurna penetapan APBD TA 2024 di ruang Bima Balai Kota Timoho.

Tingkatkan PAD, Banggar Rekomendasikan Optimalkan Aset, hingga Awasi Perizinan Hotel

Sambungan dari hal 1

Apresiasi adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun juga disampaikan, PAD pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 658.724.912.873,00 sedangkan di tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 774.621.508.426,00.

"Kami memberikan beberapa catatan pada sisi pendapatan diantaranya ialah proporsi pajak daerah pada PAD yang masih tinggi, upaya meningkatkan PAD tanpa terlalu bergantung pada penerimaan pajak dan lainnya," ujarnya.

Untuk meningkatkan PAD Kota Jogjakarta, beberapa langkah strategis mulai dilakukan. Langkah strategis tersebut diantaranya pengoptimalan pemanfaatan aset daerah, inventarisasi potensi pendapatan baru di sektor pariwisata, peningkatan program ekohomi kreatif dan peningkatan pengawasan izin pembangunan gedung perhotelan dan usaha lainnya.

"Khusus untuk sektor pariwisata, pelaksanaan event pariwisata hendaknya tidak hanya sekedar seremonial untuk menghabiskan anggaran namun perlu adanya strategi berkelanjutan," tuturnya. Alokasi Belanja daerah pada APBD tahun 2024 yang anggarannya senilai Rp 2.031.405.801.555 harus dapat mendukung ketercapaian kinerja Pemkot Jogjakarta. Jika hal itu terlaksana, kebijakan anggaran terhadap APBD tahun 2024 dapat selaras dengan tema pembangunan daerah Kota Jogjakarta yaitu 'Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan

Kota Jogjakarta'

"Tematik pembangunan Kota Jogjakarta tahun 2024 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Jogjakarta, yaitu sebagai kota pendidikan berkualitas didukung dengan pelayanan jasa yang memadai untuk keberlanjutan pembangunan dalam segala bidang termasuk infrastruktur dan pariwisata. Hal tersebut sebagai penggerak ekonomi utama untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Untuk mengupayakan penguatan kualitas SDM sejak dini, penguatan Posyandu juga dibutuhkan mengingat Posyandu sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mendapatkan anggaran rutin dari OPD kewilayahan dan OPD sektoral.

"Agaknya diperlukan dukungan berupa penambahan anggaran bagi kader Posyandu pada setiap kegiatan penimbangan balita pada APBD tahun anggaran 2024," tuturnya. Masalah penanggulangan dampak penutupan TPA Piyungan di tahun 2024 juga disampaikan, diantaranya dilakukan intervensi hingga ke wilayah Rat agar menyediakan tempat sampah yang memadai dan compatible dengan sistem truk sampah milik Pemkot Jogjakarta. Pemkot juga harus memfasilitasi berupa alat pembakar limbah padat di wilayah yang memenuhi standar minimal pengelolaan sampah. Penanganan sampah melalui program 'Mbah Dirjo' agar lebih memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan yang timbul dari pembuatan biopori di wilayah.

"Untuk wilayah yang tidak memungkinkan dibuat bio-

pori agar dilakukan intervensi yang lebih intensif dengan cara penambahan sarana angkut sampah," ujarnya.

Upaya tersebut selaras dengan catatan dan rekomendasi DPRD Kota Jogjakarta terhadap pelaksanaan gerakan zero sampah anorganik. Melalui pembentukan Panitia Khusus, DPRD Kota Jogjakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Pencanangan program tersebut merupakan upaya menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

"Dengan adanya gerakan tersebut, diharapkan tidak ada lagi sampah anorganik yang dibuang ke TPA dan semoga bisa meningkatkan pengurangan sampah yang ditargetkan sebanyak 40% pada tahun 2023," tandas Juru Bicara Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik DPRD Kota Jogjakarta, Nur Anita Dwiwanti Putri.

Pihaknya juga menginformasikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Jogjakarta melalui sekolah telah melakukan upaya pengurangan sampah dengan membuat inovasi alat pembakaran sampah tanpa asap. Inovasi tersebut telah dilakukan di SMP N 10 Jogjakarta dan akan dijadikan model bagi sekolah lain.

"Banyak alat pembakar sampah (incinerator) yang mengalami kegagalan karena alat yang dibuat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak memenuhi persyaratan dan tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu pada Anggaran pe-

rubahan tahun 2023 Pemkot Jogjakarta berencana mengadakan pembelian incinerator," tambahnya.

Maka dari itu, prioritas penggunaan anggaran pada tahun 2024 agar dialokasikan untuk pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah diserahkan kepada masyarakat dan untuk memberikan jaminan sosial untuk pengurus RT/RW.

Demi tercapainya terlaksananya pembangunan tersebut diperlukan sinergi seluruh OPD agar program dapat terlaksana dengan baik. Anggaran yang telah dialokasikan juga diharapkan bisa terserap dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jogjakarta khususnya untuk mengentaskan kemiskinan, ketahanan pangan, penanganan stunting dan pengembangan pariwisata dan UMKM.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Anggaran menyimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2024 layak disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

DPRD Kota Jogjakarta menggelar rapat paripurna, Senin (27/11) di Ruang Bima, Balai Kota Jogjakarta. Dalam agenda tersebut dilakukan penandatanganan persetujuan secara bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang APBD anggaran 2024. Kegiatan itu dihadiri oleh anggota DPRD dan perwakilan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Jogja. Ketua DPRD Danang Rudyatmoko berperan sebagai pemimpin rapat. Hadir juga Penjabat Walikota Jogjakarta, Singgih Raharjo. (cr5/kus/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005